



IDENTITAS ARTIKEL JURNAL

Judul: **Hubungan Agama dan Negara Dalam Negara Pancasila**
 Penulis: Budiyo
 Publikasi: Fiat Justisia Jurnal Hukum Vol. 8.No. 3 Juli-September 2014

Abstrak: Dalam abstrak artikelnya, penulis menjelaskan hubungan agama dan negara di Indonesia sebagaimana pandangan mainstream yang ada yakni bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Relasi keduanya saling membutuhkan dan bersimbiosis. Menurutnya, Indonesia menetapkan sila pertama Pancasila sebagai spirit keagamaan termasuk kepercayaan di dalamnya. Spirit yang dia maksudkan ialah memberi ruh kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun sebagai standar penulisan abstrak jurnal seharusnya isinya menerangkan pokok kajian, metode yang digunakan, dan hasil. Abstrak yang disajikan penulis baru sebatas menjelaskan secara esensi dari pokok kajian.

Kata Kunci: Penulis menentukan 3 kata, yakni negara, agama, dan saling membutuhkan.

Kata “negara” yang dimaksud oleh penulis mengandung beberapa pengertian yakni negara Indonesia, negara Pancasila, dan negara yang bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Artinya, tidak mengandung konsep tertentu secara eksplisit dan defenitif. Kata “agama” mencakup pengertian agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia.

Sedangkan kata “saling membutuhkan” diterjemahkan ke dalam pengertian: hubungan yang erat, tidak terpisah, dan saling menguntungkan.

Sebagai satu standar penulisan artikel jurnal, tiga kata kunci tersebut cukup memberikan pengertian yang dimaksud penulis. Namun definisi itu masih terlalu umum.

Metode Kajian: metode kajian yang digunakan penulis ialah menggunakan pendekatan hukum normatif yang bersumber pada hukum sebagai bahan hukum primair (*primair law material*) berupa UUD 1945, Kebijakan legislasi Nasional, dan UU HAM; bahan sekunder (*secondary law material*) berupa referensi hukum, hasil penelitian, atau literatur-literatur lain yang terkait; bahan tersier (*tertiary law material*) yakni kamus atau ensiklopedia. Jika dikaitkan dengan judul dan masalah yang dikaji, maka pendekatan itu sudah tepat.

Pembahasan: dalam membahas pokok kajian, di paragraf pertama penulis menjelaskan bahwa dasar pendirian bernegara sangat berkaitan dengan karakteristik dan struktur masyarakat Indonesia, dan akan menentukan pula pilihan dan nilai dalam mengatur hubungan agama dan negara.

Pada paragraf kedua, penulis mengkaitkan dasar pendirian bernegara dengan sistem bangun ketatanegaraan. Menurutnya, Pancasila lahir sebagai kesepakatan bersama untuk menengahi dua kutub yang bersitegang secara diametral antara yang menginginkan agama sebagai dasar pendirian negara dan yang menginginkan kebangsaan sebagai pilihan yang paling kontekstual dengan realitas politik.

Paragraf ketiga, penulis secara mekanis menjelaskan hakekat sila pertama Pancasila dalam kehidupan keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Sejatinya, menurut penulis, manusia lahir sudah membawa identitas sosial agamanya masing-masing. Namun perbedaan itu harus dipersatukan dalam kehidupan kebangsaan.

Di paragraf keempat, penulis mengutip dua sumber dalam membaca politik hukum keagamaan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila yakni dari Prof. Moh. Mahfud MD., dan risalah sidang MPR dalam pembahasan perubahan UUD 1945. Poin-poin utama kutipan dari Prof Mahfud yang dikemukakan penulis, minimal ada 4 kaedah yakni (1) harus menjaga integrasi bangsa baik secara ideologi maupun teritori. (2) harus dalam rangka

membangun demokrasi dan nomokrasi sekaligus. (3) harus dalam rangka membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (4) harus mengembangkan toleransi yang berkeadaban.

Sementara MPR sendiri, menurut penulis, memberi lima arah kebijakan negara (1) tidak mengubah Pembukaan UUD 1945. (2) mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3) mempertahankan sistem presidensial. (4) memindahkan hal-hal normatif ke dalam pasal-pasal UUD 1945. (5) mengambil langkah adendum daam amandemen UUD 1945. Poin penting dari arah kebijakan itu ialah dikeluarkannya Pembukaan dari batang tubuh UUD yang berati Pancasila tetap kuat sebagai arah kebijakan negara.

Dalam paragraf lima, enam, dan tujuh, secara substansi dan mekanis penulis menjelaskan Pembukaan yang di dalamnya terkandung Pancasila mengindikasikan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum ketatanegaraan Indonesia. Secara filosofis, Pancasila menjadi *rechtsidee* yang menentukan haluan pokok negara. Sementara secara politik, MPR meneguhkan landasan ideologi negara berdasarkan hukum Pancasila untuk membangun kekuasaan yang seimbang dan tidak sewenang-wenang.

Dalam paragraf ke delapan, penulis menegaskan kembali posisi negara dalam agama bukan pada wilayah materi seperti akidah melainkan wilayah publik keberagamaan. Tujuan dari posisi itu dalam rangka tertib kehidupan beragama yang damai. Dijelaskan dalam paragraf berikutnya, agama dalam sistem hukum Indonesia telah menjadi keharus yang takterhindarkan. Manifestasinya telah memperoleh legitimasi yang kuat baik secara filosofis, yuridis, dan politis. Secara filosofis, sila pertama memberikan landasan kebebasan beragama dan kepercayaan tiap-tiap warga. Negara hanya memfasilitasi bagaimana agar warga hidup beragama yang damai, tertib, dan rukun. Karena itu, menurut penulis, perlu dibuat regulasi terkait perlindungan keamanan atau keselamatan beragama, regulasi ketertiban masyarakat, regulasi terkait etik dan moral, regulasi terkait kesehatan masyarakat, dan perlindungan hak-hak mendasar lainnya.

Dalam paragraf sepuluh dan sebelas, penulis menjelaskan kedudukan norma Pancasila dalam sistem norma hukum Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai *staatsfundamentalnorn*, yang menjadi titik pijak dan berangkat pada pembentukan norma bernegara berikutnya (derivatif). Namun dalam konteks realitas yang berubah,

hukum harus dinamis menjawabnya. Sebagai norma pokok negara ada dua fungsi Pancasila: fungsi konstitutif dan fungsi regulatif. Fungsi konstitutif artinya Pancasila menentukan dasar arti dan makna hukum. Sedangkan fungsi regulatif adalah apakah suatu produk hukum itu adil atau tidak.

Dalam Paragraf kedua belas, penulis menjelaskan kembali kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum akan menentukan isi dan bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut penulis, sebagai sumber hukum, nilai-nilai Pancasila memberi ruh pada pembentukan norma-norma hukum negara secara hierarkis. Dengan demikian, antara norma yang di atas dan norma yang di bawah harus bersesuaian. Tidaksesuaian norma yang terjadi (kontradiksi) mengakibatkan suatu norma inkonstitusional, illegal, dan batal demi hukum.

Dalam paragraf terakhir pengantar pembahasan, penulis menegaskan bahwa Indonesia dengan Pancasila merupakan entitas yang satu, melekat pada watak dan karakter budayanya, yang tidak bisa disamakan dengan negara lainnya. Pancasila merupakan takdir politik atau *kalimatun sawa* masyarakat bangsa yang pluralis dalam hidup bernegara.

Sub Bahasan I: Hubungan Negara dan Agama

Pada awal sub bahasan ini, penulis menjelaskan bahwa dari tiga tipe hubungan negara dan agama di dunia, seperti negara sekuler, negara ateis, negara religius, Indonesia memilih tipe yang khas yakni tidak mengadopsi di antara ketiga tipe itu melainkan elektis dengan memilih pepaduan di antara negara sekuler dan agama. Secara historis, tipe negara Pancasila ini lahir dalam proses yang panjang dan dinamika yang menarik (pasang surut). Perdebatan yang dimulai sejak perumusan UUD dalam rapat BPUPKI antara kubu Soekarno dari nasionalis sekuler dan kubu M. Nasir (HOS. Cokroaminoto, Agus Salim, Ahmad Hasan) dari nasionalis Islam. Menurut Soekarno, Negara dan agama harus dipisah. Agama merupakan urusan spiritual, sementara negara urusan pemerintahan. Sedangkan M. Natsir, agama bukan hanya mengatur urusan spiritual dan Tuhan semata, melainkan persoalan-persoalan lembaga pemerintahan yang di dalamnya mengatur kemasyarakatan dan sistem hukum. Dalam perdebatan itu masing-masing kubu berangkat dari pemikiran agama dan negara yang ada yakni sekulerisme dan teokrasi atau

religiusme. Dalam perumusan Pancasila, kubu nasionalis seperti M. Yamin mengusulkan 5 butir yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Soepomo dan Hatta memiliki pandangan yang sama, demi persatuan hendaknya agama dan negara dipisahkan. Dari pendekatan sejarah, penulis melihat kesepakatan langkah eklektis dengan pepaduan itu sesungguhnya langkah kompromis demi persatuan dan tegaknya nilai-nilai moral dan hukum.

Kesimpulan: Dalam kesimpulannya penulis menegaskan bahwa Hubungan agama dan negara saling membutuhkan. Dasarnya adalah Pancasila sila pertama. Dalam posisi itu, negara hanya fasilitator.

dalam membahas pokok kajian, di paragraf pertama penulis menegaskan bahwa hubungan agama dan negara dalam negara Pancasila saling terkait dimana posisi negara aktif dan dinamis membimbing, menyokong, memelihara, dan mengembangkan agama dan kepercayaan yang ada. Negara menjamin kebebasan beragama. Artinya, agama menjadi domain privat. Negara hanya memberikan jaminan secara yuridis, dan memfasilitasi perwujudan rasa aman dan damai dalam menjalankan agama dan kepercayaan warganya. Di akhir paragraf ini penulis mengkaitkan aspek moralitas pentingnya negara mengatur agama dalam kehidupan masyarakat yang pluralis. Jadi, ada tiga hal yang dijelaskan dalam paragraf pertama ini yakni deskripsi konseptual relasi agama dan negara dalam negara Pancasila. Kedua, posisi negara terhadap agama. Ketiga, aspek nilai pentingnya negara hadir dalam persoalan agama.

Penutup: Dalam konklusinya penulis menjelaskan bahwa Pancasila dan UUD 1945 meletakkan dasar relasi agama dan negara secara eklektis. Eklektis artinya tengah-tengah, tidak sekuler dan tidak religius. Prinsip dasar relasi agama dan negara adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Prinsip ini mengajarkan bahwa negara aktif dan dinamis membimbing, menyokong, memelihara, dan mengembangkan agama dan kepercayaan. Kebebasan beragama dan berkeyakinan atau berkepercayaan sebagai domain privat dijamin oleh negara. Posisi negara menjaminkannya secara yuridis dan administratif demi dan dalam rangka terciptanya kehidupan keagamaan yang tentram, tertib, dan damai.

Referensi: sumber rujukan pokok terdiri dari UUD 1945 dan dua buah buku yang langsung membahas negara dan agama, selebihnya sumber rujukan mengenai konstitusi dan konsep negara hukum sebanyak lima buah buku. Sumber rujukan lain jurnal dan situs internet.

Kelebihan: Artikel jurnal ini menambah sederetan kajian mengenai hubungan agama dan negara dalam negara Pancasila. Kajiannya menegaskan kembali kedudukan negara, bentuk hubungan, prinsip, dan tujuan konsep negara dan agama dalam Pancasila. Kajian ini menarik dan kontekstual jika melihat perkembangan terakhir era reformasi banyaknya bermunculan gerakan ekstrimisme atau terorisme, persekusi minoritas, serangan dan pengrusakan rumah ibadah dan ritual ibadah, larangan pendirian rumah ibadah, penolakan pemakaman tak seiman, ujaran kebencian berdalih keimanan, politisasi agama di berbagai mimbar masjid dan majlis taklim, dan ancaman ideologi dan gerakan khilafah Islam. Karenanya, mengkaji kembali dimensi filosofis dan etik bernegara berdasarkan Pancasila menjadi urgen dilakukan. Persatuan yang telah terbangun dari pluralitas keagamaan selama ini harus dipertahankan melalui penanaman dan penguatan nilai-nilai Ketuhanan Pancasila sebagaimana dijelaskan penulis secara berulang-ulang dalam pokok bahasannya. Pembahasannya normatif dan mekanis sehingga membacanya seperti duduk manis disuguhi secangkir kopi.

Sistematikanya sudah memenuhi standar penulisan jurnal ilmiah yang terdiri dari abstrak, key word, pendahuluan, metode penulisan, pembahasan, sub bahasan mengenai hubungan agama dan negara, penutup, dan daftar putaka. Namun penulisan sub bahasan hanya satu seharusnya perlu ditambahkan sub bahasan yang lain. Penulisan kata, kalimat, dan paragraf masih kurang baik. Terdapat istilah bahasa Inggris yang kurang lengkap (hlm. 416, “*rechtside*” seharusnya “*rechtsidee*”), salah ketik (hlm. 411, “praktek” seharusnya “praktik,” hlm. 414 “di dasarkan” seharusnya “didasarkan”), dan uraian kalimat yang berulang-ulang (hlm. 416, 417, 421, 422)

Kekurangan: *Pertama*, dalam uraian pengantar, identifikasi masalah yang dikaji penulis tidak memperlihatkan satu kajian yang problematis. Identifikasi masalah sangat mekanis sehingga tidak terlihat akar masalahnya. Misal di halaman 411, dengan merunut dasar konstitusional kewajiban negara memberi perlindungan Pasal 29 UUD 1945, kemudian

mengkaitkan dengan bentuk jaminan itu dengan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang justru di situlah problem sesungguhnya muncul. UU No. 1/PNPS/1965 memberikan atribusi administrasi (*beleidsregels/diskresi*) yang luas kepada Kepala Daerah mengatur agama dan kepercayaan dalam ranah lokal kekuasaannya. Seperti SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, yang diikuti dengan peraturan-peraturan kepala daerah seperti Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Bogor No. 503/208-DTKP tentang Pencabutan Izin Pendirian Gereja Yasmin Bogor, Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2011 tentang Larangan Ahmadiyah, dan lain sebagainya. Dengan mendasarkan UU No. 1/PNPS/1965, pembatasan dan pengurangan hak beragama dan berkepercayaan demi dan mengatasnamakan kerukunan.

Kedua, dalam pembahasan, sub bahasan tidak mendeskripsikan dua ruang lingkup pokok masalah yang dikaji yakni mengukur kesesuaian aspek normatif konstitusional terhadap intervensi negara dalam pengaturan agama, dan posisi negara dan agama dalam negara Pancasila. Sub bahasan hanya ditujukan pada posisi dan relasinya dalam negara Pancasila berdasarkan norma Konstitusi, prinsip, dan doktrin hukum yang terkait dengan itu.